



# Jangan Jadi Beban di 2022

## Pemkot dan DPRD Bahas Anggaran Pembangunan Menara Balai Kota

**JOGIA, Radar Jogja** – Rencana pembangunan gedung unit XI atau menara Balai Kota belum disepakati. Rapat Paripurna DPRD Kota Jogja pembahasan pembangunan menara Balai Kota ditunda hingga hari ini. Badan Anggaran DPRD mempertimbangkan beban pembangunan di APBD 2021.

Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudiantomo memastikan konsep *multi-years* jadi pertimbangan utama. Beban pembangunan tak cukup berbicara tahun anggaran 2020. Namun juga harus melihat potensi beban di tahun setelahnya. "Dengan pertimbangan itu maka kami mencoba untuk *review* ulang dulu bebannya. Tidak hanya di 2020 karena ini tahun jamak, juga harus mempertimbangkan beban tahun 2021 potensinya seperti apa," jelasnya ditemui usai rapat di Gedung DPRD Jogja, kemarin (22/10).

Yang menjadi perhatiannya adalah defisit anggaran dalam APBD. Dalam rencana pembangunannya, menara Balai Kota menghabiskan dana Rp 112,137 miliar. Alokasi tahun pertama mencapai Rp 32,151 miliar. Lalu pembangunan di 2021 mencapai Rp 79,986 miliar.

Tapi politisi PDIP Jogja ini menampik menghalangi pembangunan. Baginya pembangunan menara Balai Kota juga memenuhi kebutuhan pelayanan pu-

blik. Itulah mengapa dia mendorong agar tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mendata lebih dalam.

Beberapa hal yang masih menjadi pertimbangan adalah beban anggaran. Danang tidak ingin beban anggaran sepenuhnya kepada eksekutif. Menurutnya pemkot Jogja wajib memikirkan perwujudan pembangunan lima tahun ke depan.

Sekretaris Daerah Pemkot Jogja Aman Yuriadjaya memastikan, arah program sudah jelas. Apalagi cetak biru berupa dokumentasi dan fungsi perencanaan sudah sangat jelas. Walau diakui olehnya kemampuan fiskal masih belum ada kepastian yang kuat.

Dia juga memastikan antara Pemkot Jogja dan DPRD Jogja sudah sejalan. Termasuk pemahaman tentang perencanaan, asas fungsi dan kepentingannya. "Pembahasan cenderung ke strategi kemampuan fiskal. Untuk 2020 kami akui cukup mampu, tapi 2021 yang masih dikaji. Kalau tidak mampu dampaknya akan timbul sampai 2022. Walau bicara asumsi dan prediksi, tapi proses ini penting," jelasnya.

Sedang Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengaku percaya akan pembahasan. Dia meyakini akan ada titik temu antara Pemkot Jogja dan DPRD Jogja. Pertimbangan utama adalah pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. "Kami hanya bicara prioritas melihat kemanfaatan gedung yang direncanakan untuk menyatukan pelayanan di Balai Kota," katanya. (dwi/pr/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 10 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005